



PASAR PANGURURAN

PASAR RAKYAT PERCONTOHAN

YANG DIBANGUN ATAS KERJASAMA

SIKIP DAN PERDAGANGAN RI DENGAN



BANK INDONESIA

BANK INDONESIA

RAKOR PUSAT DAERAH TPID



BANK INDONESIA

Bambang Pramono
BANK INDONESIA

BANK INDONESIA

Jakarta, 4 Oktober 2017

OUTLINE:

1

EVALUASI INFLASI DAERAH

2

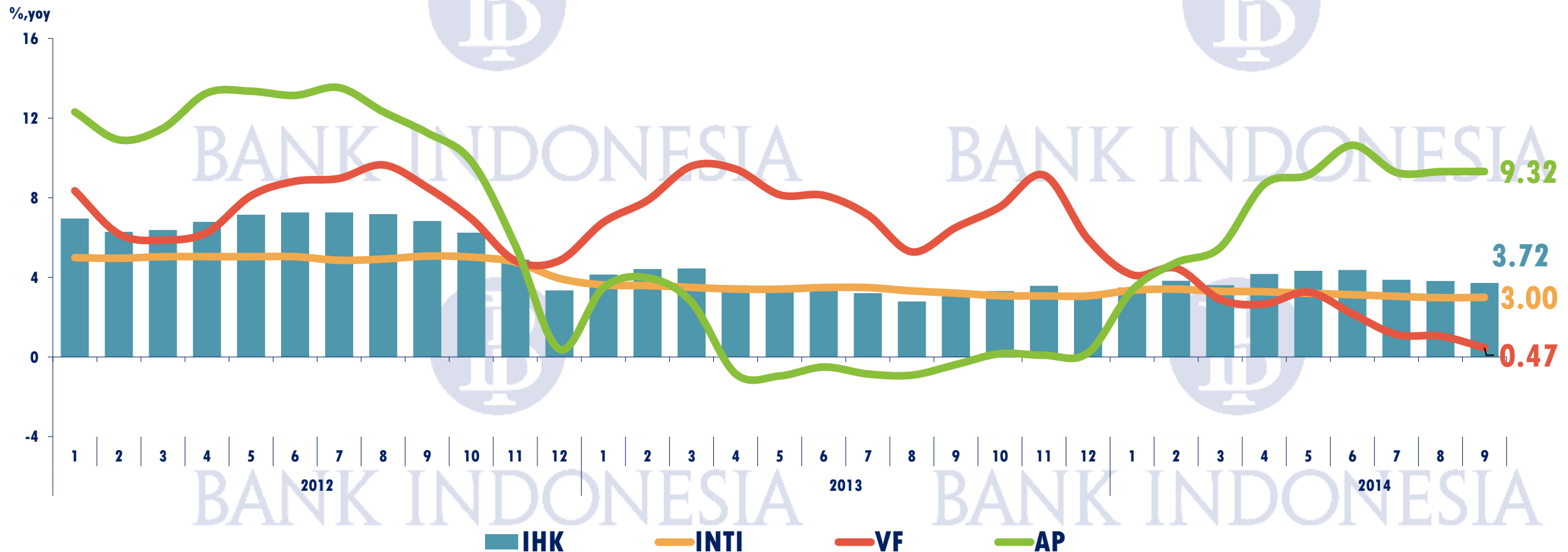
PENTINGNYA DUKUNGAN DAERAH:
PENGENDALIAN INFLASI

3

HAL YANG PERLU MENJADI
PERHATIAN

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) September 2017 mengalami inflasi rendah 0,13% (mtm), lebih rendah dibanding rata-rata inflasi September tiga tahun terakhir. Rendahnya inflasi IHK disumbang oleh deflasi *volatile foods*, rendahnya tekanan *administered prices*, dan terkendalnya inflasi inti.

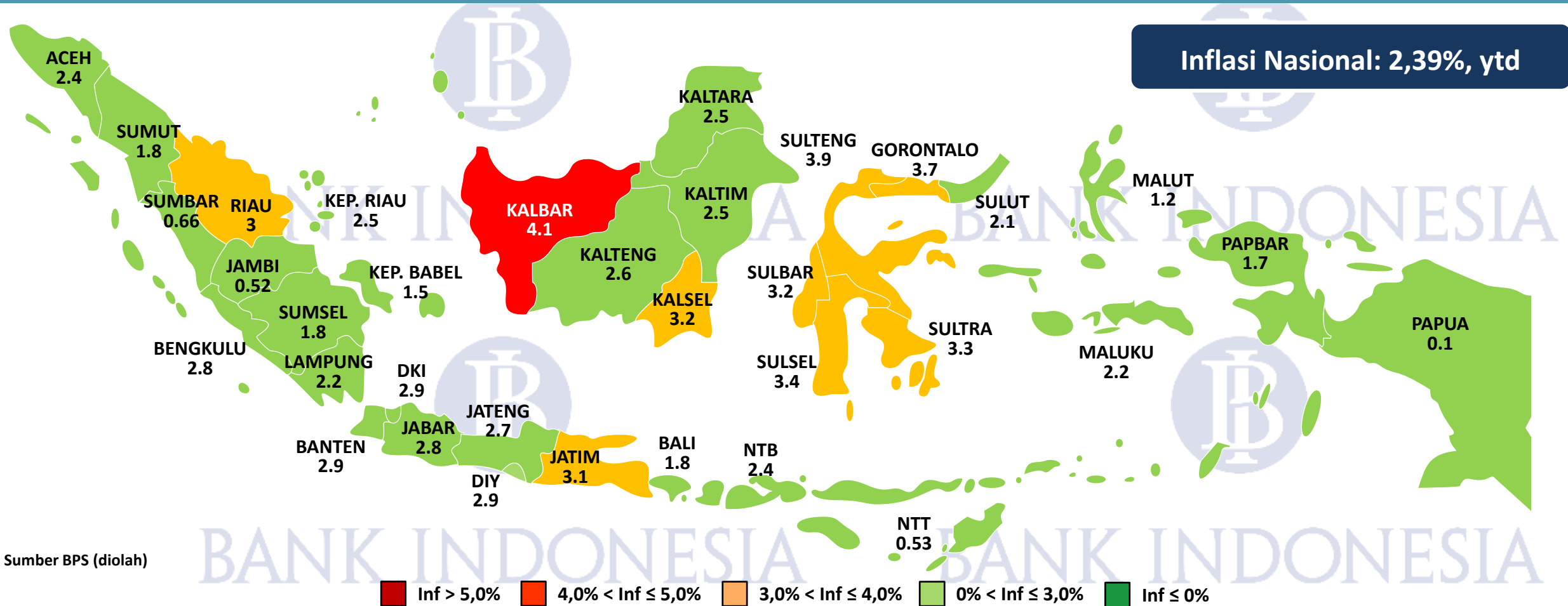
Perkembangan Inflasi (% , yoy)



Inflasi berbagai daerah masih terjaga pada kisaran target

Sampai dg September 2017, hampir seluruh daerah masih mencatatkan inflasi di kisaran target $4,0\% \pm 1\%$ kecuali Kalimantan Barat, yang terutama disumbang kenaikan tarif listrik.

Peta Inflasi Daerah s.d Agustus 2017 (%)



OUTLINE:

1

EVALUASI INFLASI DAERAH

2

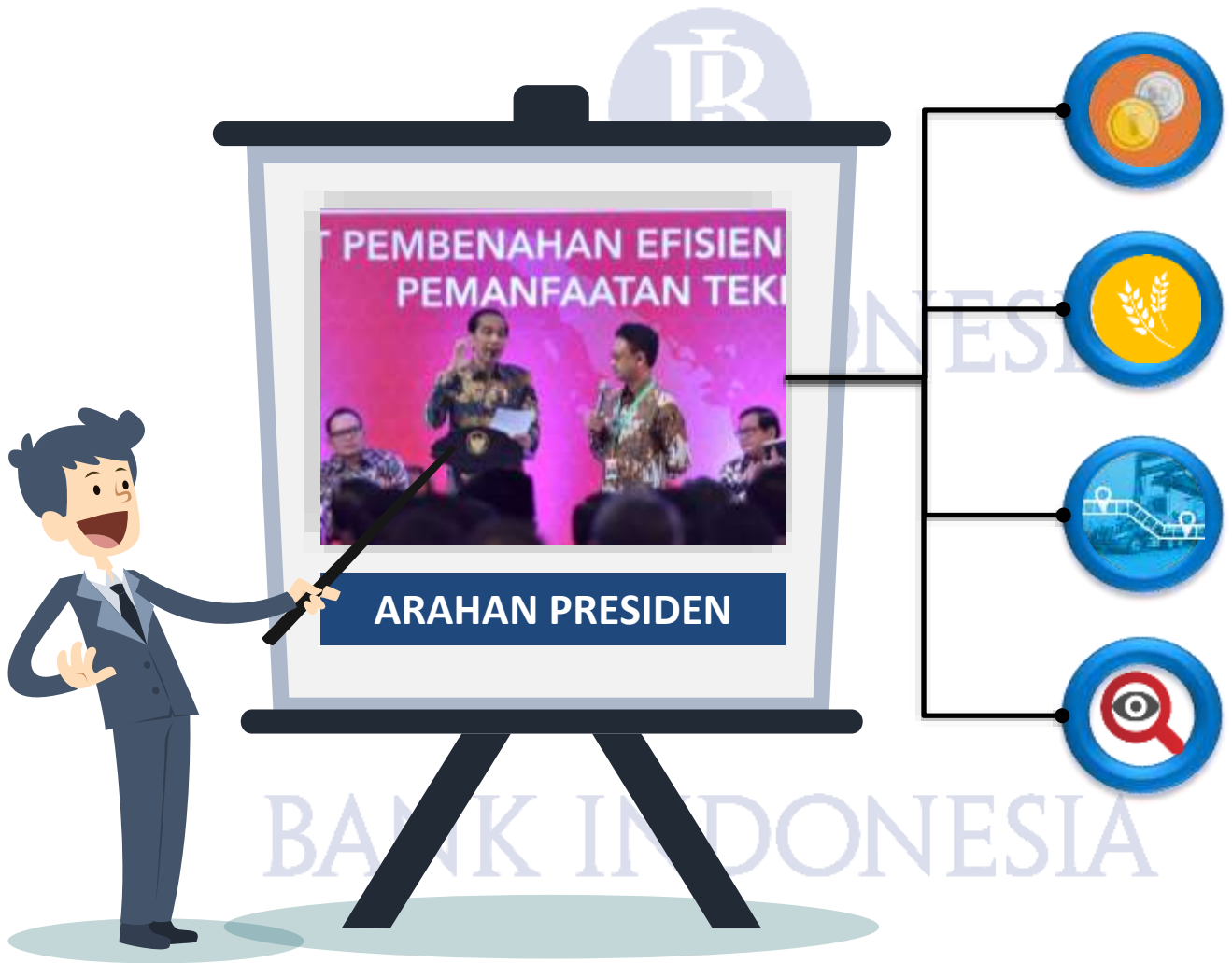
PENTINGNYA DUKUNGAN DAERAH:
PENGENDALIAN INFLASI

3

HAL YANG PERLU MENJADI
PERHATIAN

POKOK-POKOK UTAMA ARAHAN PRESIDEN:

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional 2017-2018, maka Presiden menekankan pentingnya dukungan daerah, khususnya terkait :



Optimalkan APBD untuk penguatan infrastruktur dan pengendalian harga pangan



Penguatan pertanian melalui agrobisnis

Perbaiki tata niaga/ distribusi pangan di daerah

Perkuat pengawasan distribusi dan perdagangan pangan di daerah

BANK INDONESIA

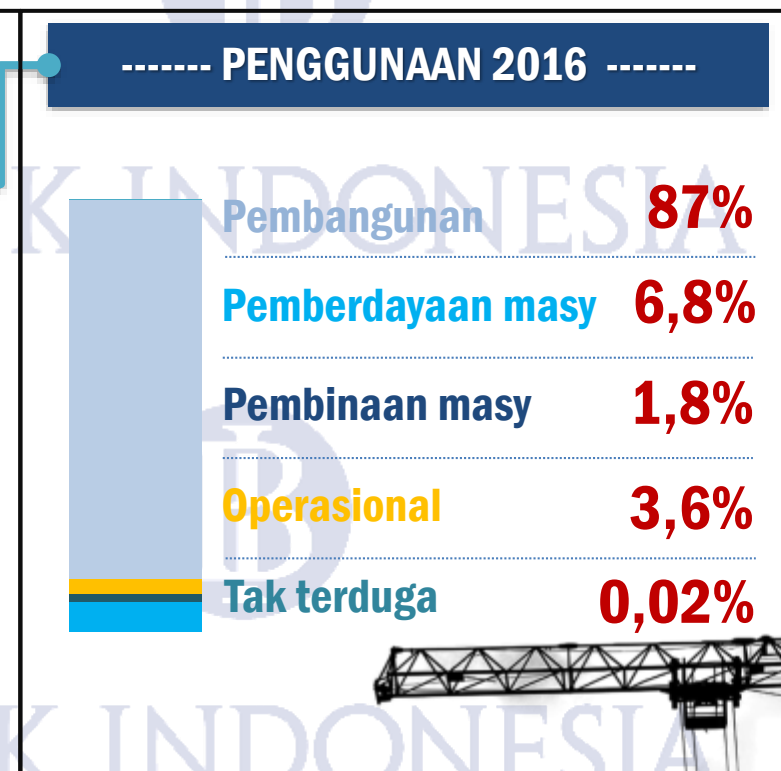
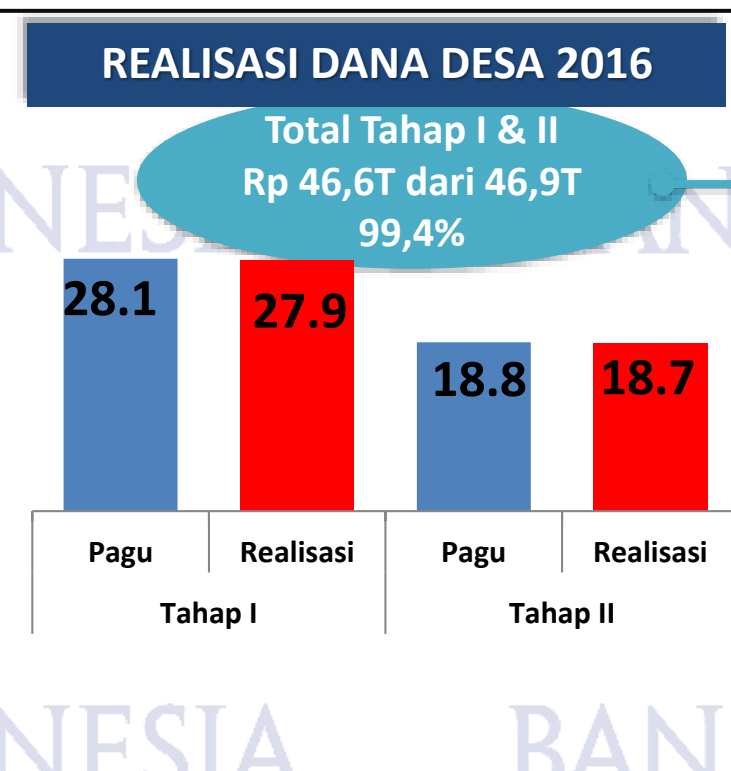
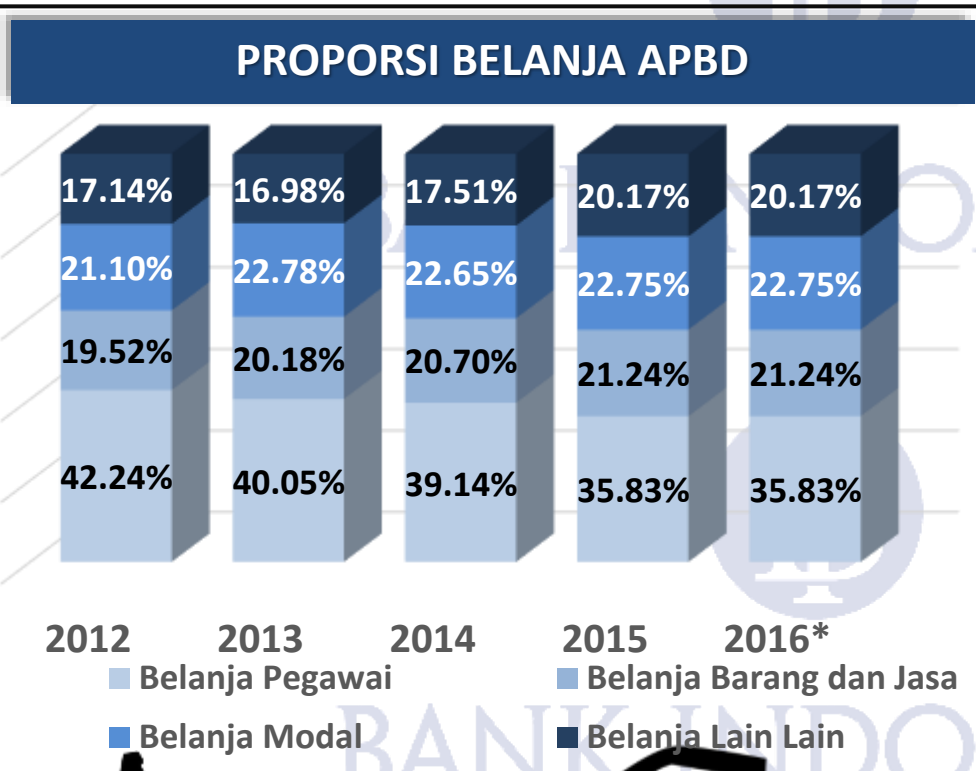
BANK INDONESIA

- Fokus alokasi belanja daerah : Presiden menegaskan pentingnya mengoptimalkan APBD pada belanja produktif yang mendorong ekonomi rakyat, baik berupa pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan.



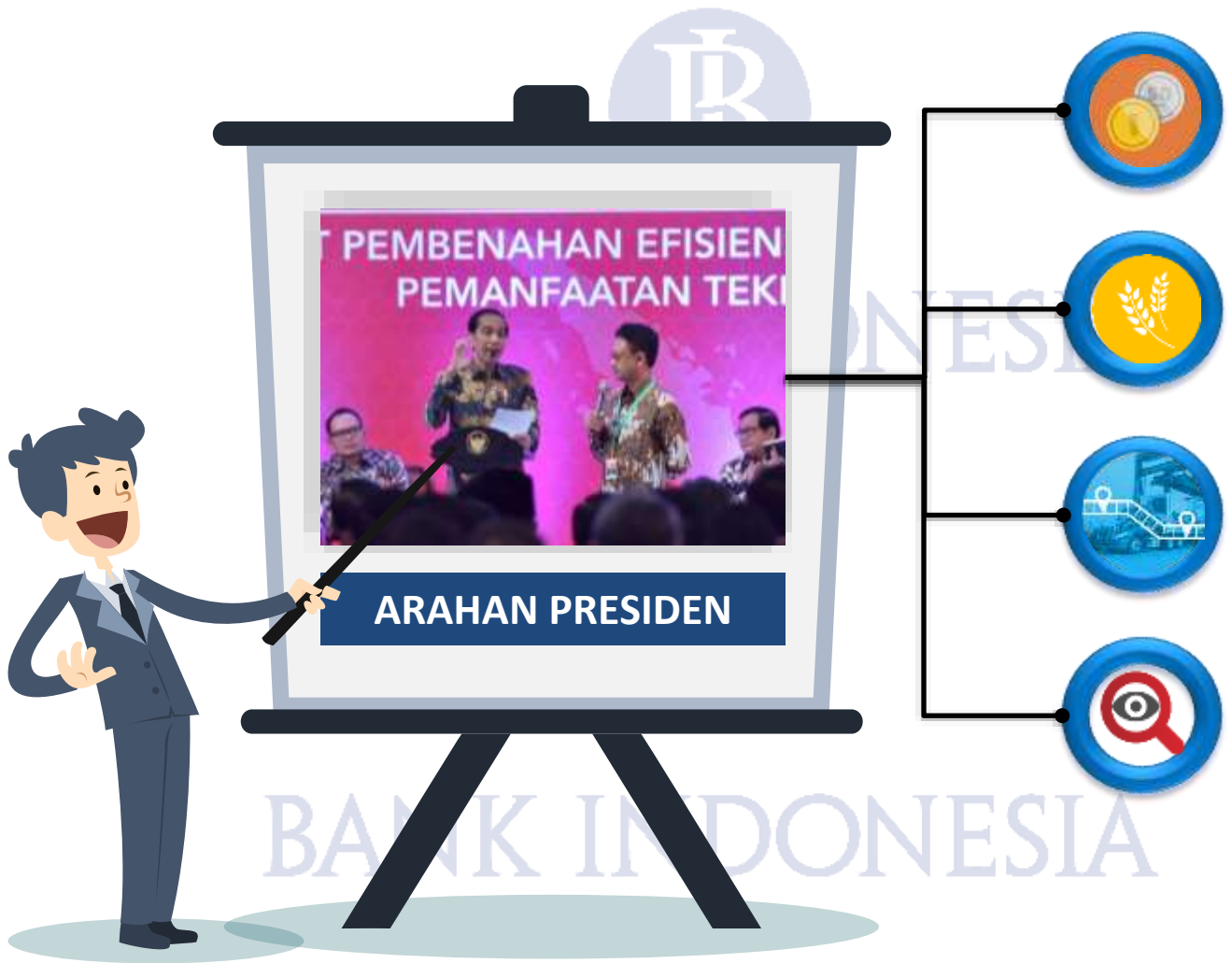
...dengan dukungan alokasi belanja APBD yang produktif, seperti halnya penggunaan dana desa 8

- Kualitas belanja masih perlu ditingkatkan (Proporsi belanja pegawai lebih besar daripada belanja modal)
- Belanja pegawai masih mendominasi profil belanja pada tahun 2012-2016 → rata-rata realisasi belanja pegawai terhadap total belanja sebesar 38,6%, sedangkan belanja modal hanya 22.4%.
- Sementara itu penggunaan dana desa pada 2016, sebagian besar difokuskan pada pembangunan infrastruktur pedesaan



POKOK-POKOK UTAMA ARAHAN PRESIDEN:

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional 2017-2018, maka Presiden menekankan pentingnya dukungan daerah, khususnya terkait :



Optimalkan APBD untuk penguatan infrastruktur dan pengendalian harga pangan



Penguatan pertanian melalui agrobisnis



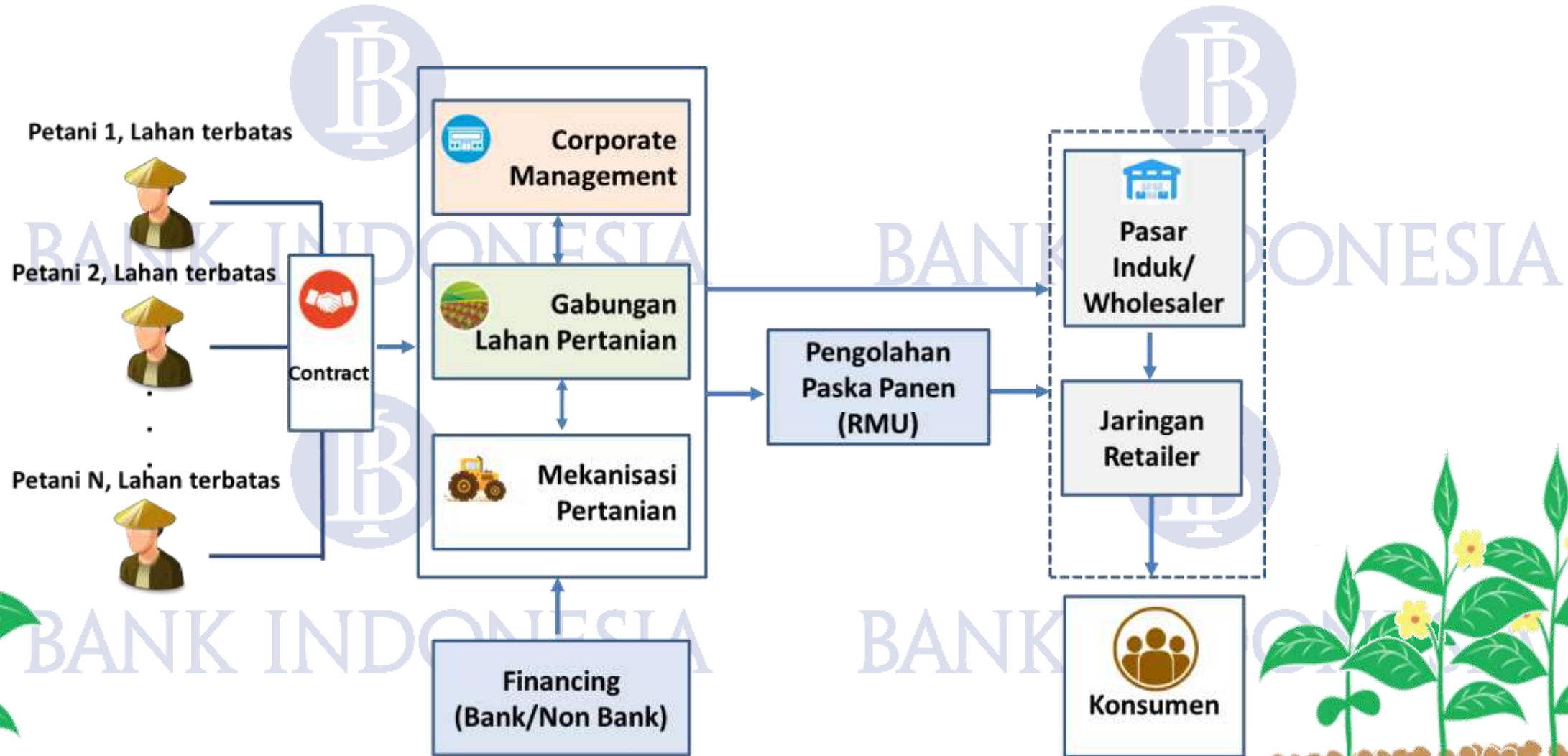
Perbaiki tata niaga/distribusi pangan di daerah

Perkuat pengawasan distribusi dan perdagangan pangan di daerah

BANK INDONESIA

BANK INDONESIA

Presiden mendorong petani berkumpul dalam sebuah kelompok besar petani → mengkorporasikan petani (manajemen moderen, berpikir dengan aplikasi-aplikasi moderen, berpikir dengan cara-cara pengolahan industri yang moderen dan sekaligus memasarkannya kepada industri retail, memasarkannya kepada konsumen).



Penguatan kelembagaan Petani diatur dalam UU No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dimaksudkan untuk mendorong skala ekonomi dan efisiensi usaha tani, serta meningkatkan posisi tawar petani

Pendampingan dilakukan dgn sinergi & koordinasi K/L: Penyuluh Pertanian (Kemtan), Pemda, DL & Swasta

Kelompok Petani

- Dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya)
- Non-formal/tidak berbadan hukum

Dasar Pembentukan

Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan)

- Unit-unit usaha otonom, a.l. unit penyedia SALTRO/ unit produksi, unit pengolahan dan pemasaran, dan unit simpan pinjam
- Non-formal/tidak berbadan hukum

Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)

- Bergerak dari kegiatan usaha tani dari hulu sampai hilir. Unit produksi berkembang mjd Klmpk Usaha Bersama
- Berbadan hukum/tdk berbadan hukum

Fungsi

- Sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi

- Menyesuaikan ruang pasar dan meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha

- Meningkatkan skala ekonomi yang menguntungkan dan efisiensi usaha

Badan Usaha Milik Petani (BUMP)

- Berbadan hukum, dapat berupa Koperasi atau Perseroan Terbatas
- BUMP tidak terbatas usahatani pertanian pangan, tetapi juga BUMP Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Pengrajin, dan juga UMKM

- Mensinergikan kegiatan bisnis & pemberdayaan petani secara korporasi
- Berorientasi keuntungan & mendorong kemandirian petani
- Meningkatkan posisi tawar petani saat mengadakan kemitraan

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional 2017-2018, maka Presiden menekankan pentingnya dukungan daerah, khususnya terkait :



Optimalkan APBD untuk penguatan infrastruktur dan pengendalian harga pangan



Penguatan pertanian melalui agrobisnis



Perbaiki tata niaga/distribusi pangan di daerah



Perkuat pengawasan distribusi dan perdagangan pangan di daerah

- **Indikasi secara umum terjadinya Monopoli dan Oligopoli pada rantai produksi-perdagangan pangan yang pada akhirnya mempengaruhi pembentukan harga dan fluktuasi harga di konsumen.**
- **Hasil survei BI: terdapat indikasi peran dominan pedagang besar dalam menentukan harga pangan di pasar**

Minimnya akses pasar langsung bagi petani → kelembagaan yang lemah

Rantai Perdagangan Menjadi Panjang → margin dikuasai pedagang

Informasi terkait kondisi Pangan Dikuasai pedagang → rentan potensi spekulasi



**KERJA SAMA
PERDAGANGAN
ANTAR DAERAH**

**MEMFASILITASI AKSES PASAR
SECARA BAGI PETANI**

**MENGOPTIMALKAN
PERAN BUMD ATAU KERJA SAMA BULOG**



PRODUSEN

**PEDAGANG
BESAR**

**PEDAGANG
BESAR**

**PEDAGANG
ECERAN**



Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional 2017-2018, maka Presiden menekankan pentingnya dukungan daerah, khususnya terkait :



Optimalkan APBD untuk penguatan infrastruktur dan pengendalian harga pangan



Penguatan pertanian melalui agrobisnis



Perbaiki tata niaga/distribusi pangan di daerah



Perkuat pengawasan distribusi dan perdagangan pangan di daerah



Upaya pengawasan distribusi dapat disinergikan dengan tugas dan fungsi Satgas Pangan di daerah

Dalam rangka pengawasan distribusi pangan daerah, Pemda perlu mendaftarkan pedagang komoditi pangan strategis sebagaimana Permendag No 20/M-DAG/PER/3/2017 tentang **Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok**



National Price Coordinating Council (NPCC)

- Pedagang teregistrasi.
- Price control Republic Act No. 7581 menerapkan hukuman:
 - bagi pihak yang melakukan manipulasi harga: kurungan 5-15 tahun dan denda PHP5.000-PHP2.000.000.
 - bagi pihak yang melanggar price ceiling: kurungan 1-10 tahun dan denda PHP5.000-PHP1.000.000.

Kementerian Perdagangan Dlm Negeri dan Kepenggunaan (KPDNKK)

- Seluruh pelaku usaha perdagangan (kios, toko, dll) terdaftar
- Price Control And Anti Profitering Act 2011 (Act 723) menerapkan:
 - ✓ Berlaku harga/margin maksimal pada waktu tertentu (HKBN)
 - ✓ Setiap perubahan cost structure yang berpotensi merubah harga jual wajib dilaporkan
 - ✓ Intervensi dilakukan setiap saat dgn mendirikan kedai 1 Malaysia



- **Pemda perlu memberlakukan aturan terkait pencantuman harga pada barang, termasuk di pasar tradisional** sebagaimana Permedag No.35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan (*price tagging*).
- Upaya ini akan meningkatkan efektifitas pengawasan, sekaligus menjadi alat deteksi dini (*early warning system*) terhadap upaya spekulasi oleh pedagang
- Kebijakan pencantuman harga juga akan mendorong pedagang untuk menjual pada harga yang ekonomis guna menarik minat konsumen
- Dengan dukungan regulasi terkait registrasi pedagang dan pencantuman harga barang, **masyarakat juga dapat berpartisipasi langsung dalam melakukan pengawasan di lapangan**



KPDNKK

- **Price Control And Anti Profitering Act Malaysia 2011 (Act 723)** juga menerapkan aturan bahwa setiap penjual wajib menunjukkan level harga di setiap barang yang dijual



OUTLINE:

1

EVALUASI INFLASI DAERAH

2

PENTINGNYA DUKUNGAN DAERAH:
PENGENDALIAN INFLASI

3

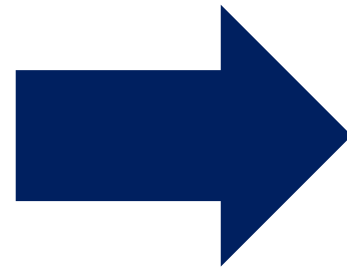
HAL YANG PERLU MENJADI
PERHATIAN KE DEPAN

- Terkendalinya inflasi didukung semakin kuatnya koordinasi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengatasi sejumlah risiko inflasi, khususnya inflasi pangan



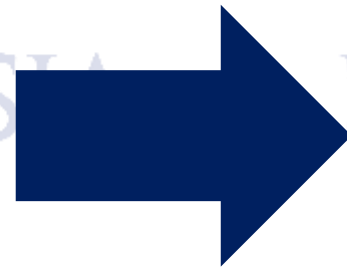
Sasaran Inflasi Nasional

2015 - 2017



4% ± 1%

2018

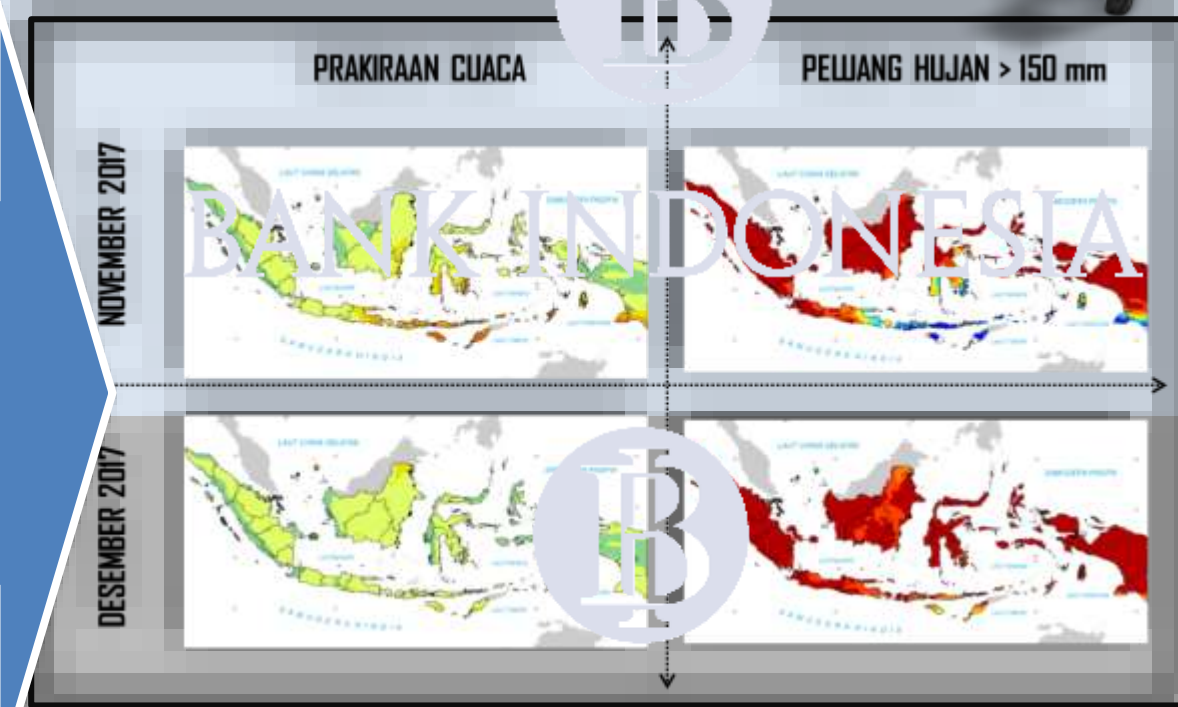
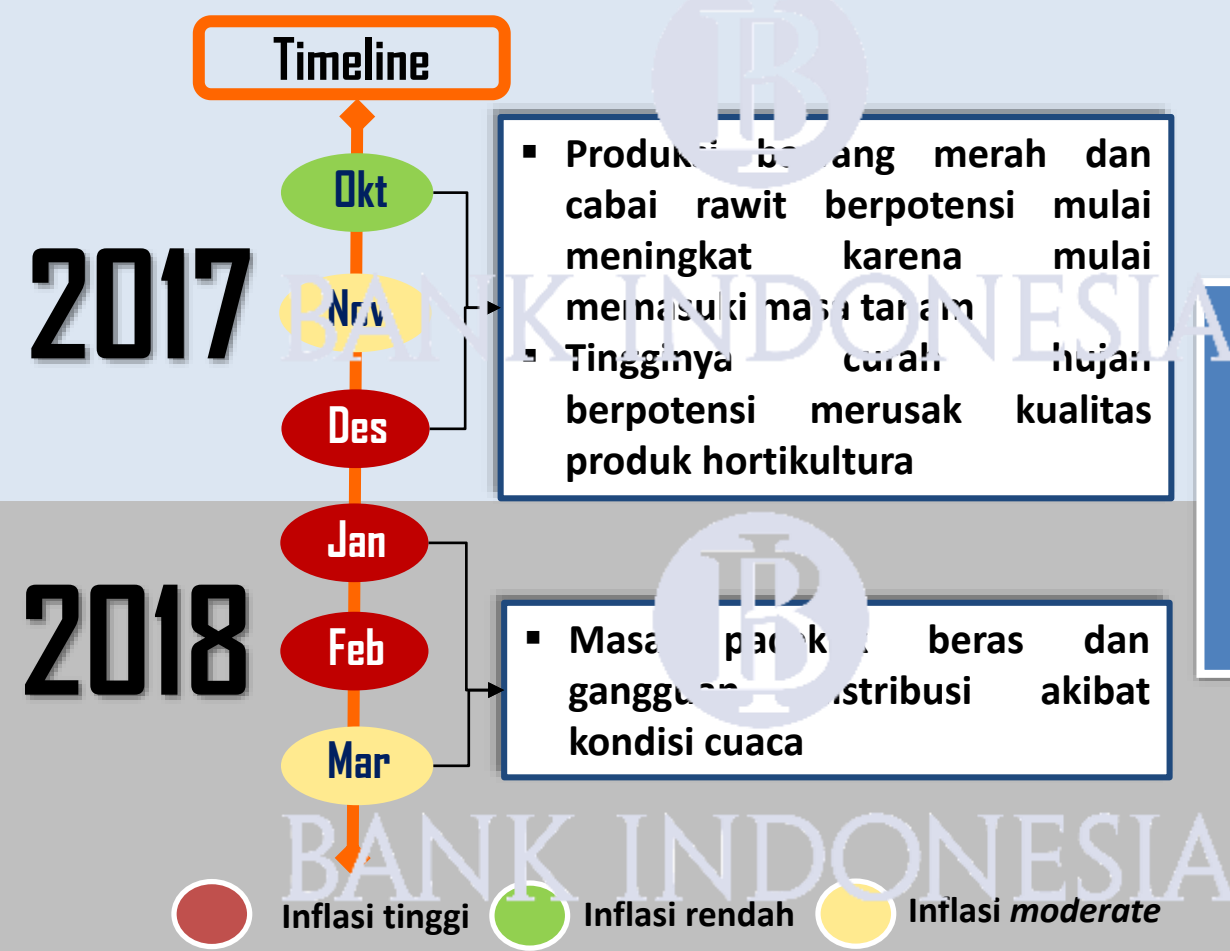


3,5 ± 1%

Ke depan, diperlukan *extra effort* bersama untuk mengawal inflasi pangan...



- Penguatan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta sejumlah upaya pengendalian harga pangan oleh TPID mendukung terjaganya inflasi di berbagai daerah
- Ke depan, TPID perlu mewaspadaai sejumlah risiko inflasi, khususnya inflasi pangan

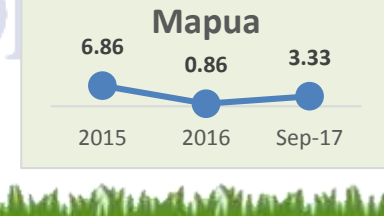
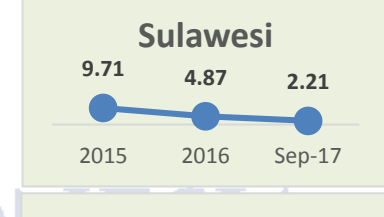
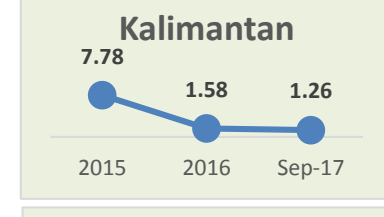
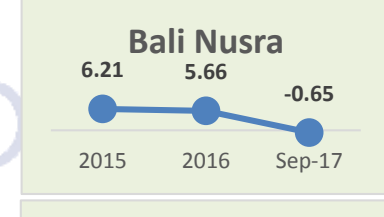
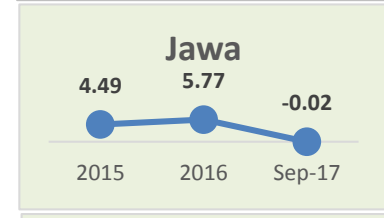
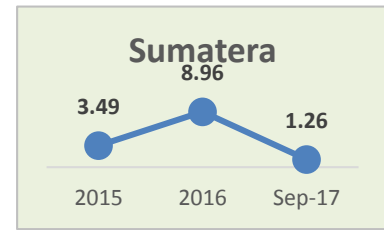
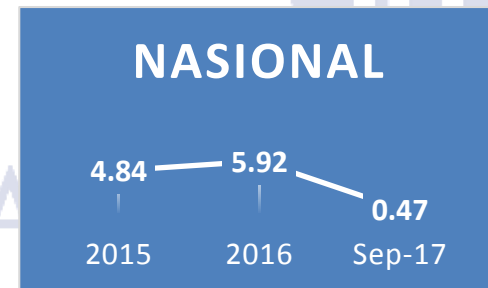


BANK INDONESIA

...khususnya di beberapa daerah yang masih relatif tinggi

Terdapat 5 daerah yang mencatat inflasi *volatile food* (VF) yang tinggi yakni Maluku (10.86%), Gorontalo (7.95%), Sultra (6.92%), Sulteng (6.39%), dan Kaltara (5.02%)

Perkembangan Inflasi Daerah – September 2017 (VF yoy)





BANK INDONESIA

BANK INDONESIA

Great things are never done by one person, they're done by a team of people



TERIMA KASIH

BANK INDONESIA

BANK INDONESIA